

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Dalam organisasi pemerintahan, kepuasan dan keberhasilan saling berkaitan, menurut teori pengelolaan. Pemerintah sebagai *steward* yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya, sedangkan masyarakat merupakan pemilik utama sumber daya tersebut. Adanya hubungan antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat (*principal*) dibangun atas dasar kepercayaan melalui kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu untuk memberikan pelayanan dan pertanggungjawaban kepada publik (Retno & Widiatmoko, 2019).

Gagasan ini juga menyatakan bahwa pemerintahan daerah dapat dipercaya oleh masyarakat, memenuhi tujuan masyarakat, dan memaksimalkan pelayanan masyarakat, dan bertanggungjawab terhadap keuangan yang diberikan kepadanya, yang akhirnya dapat mencapai tujuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin (Prawiroyudo & Suhendro, 2023).

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bentuk pengeluaran dipergunakan untuk memperoleh aset tetap yang dimiliki dan dimanfaatkan pemerintah daerah yang memberikan manfaat ekonomis dalam jangka panjang. Dan aset tetap tersebut yang digunakan untuk operasi unit kerja, bukan untuk dijual.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan belanja modal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak hanya berfungsi menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan tetapi juga bentuk fisik dari pelayanan publik (Kurniasari & Kurnia, 2021). Menurut Peraturan Menteri Keuangan 101 Tahun 2011, Belanja Modal memiliki lima bidang utama:

- a. Belanja modal untuk pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan tanah,
- b. pengeluaran untuk pembelian peralatan serta mesin dalam kegiatan pemerintah,
- c. pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan lainnya,
- d. pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, dan sejenisnya, serta
- e. pengeluaran untuk pembelanjaan aset fisik lainnya.

Belanja Modal pada masa pandemi Covid-19 menjadi dikesampingkan mengingat adanya kebutuhan wajib dan mendesak seperti kesehatan dan bantuan sosial yang harus dipenuhi (Sitepu *et al.*, 2022). Hal ini menjadikan banyak proyek atau pembangunan yang tertunda bahkan dibatalkan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. (Mahendra *et al.*, 2025) menyatakan bahwa ekspansi ekonomi jangka panjang meningkatkan produksi per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah

seberapa besar kegiatan ekonomi menghasilkan tambahan uang bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Rata-rata pendapatan tiap orang dapat melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat perkapita.

Jika pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan jumlah produksi pada barang dan jasa, hal ini mengindikasikan faktor produksi makin produktif, maka perekonomian sedang mengalami pertumbuhan. (Nurzen & Riharjo, 2016). Regina (2022), menyatakan bahwa hal ini meliputi jumlah produksi dalam industri, peningkatan infrastruktur, pendidikan, peningkatan produksi pada sektor jasa, serta pertumbuhan produksi barang modal.

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi per kapita yang terjadi dalam kurun waktu kedepannya. Definisi ini berfokus aspek proses, output per kapita, dan juga komponen jangka panjang.

Masa Covid-19 memberikan dampak yang serius terhadap bidang ekonomi. Hal ini sangat terlihat jelas dari Pertumbuhan Ekonomi daerahnya. Selama masa pandemi Covid-19 sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan dan industri mengalami penurunan yang drastis. Hal ini tentu secara langsung mengakibatkan penurunan pertumbuhannya.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah mengacu pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak, retribusi, perusahaan daerah, dan pengelolaan aset daerah berperan dalam mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan PAD. Sambodo (2020), meningkatkan infrastruktur ekonomi mereka dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan.

Namun selama pandemi Covid-19, PAD mengalami penurunan drastis akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat (Akbar *et al.*, 2022). Pembatasan sosial, penurunan daya beli, serta lesunya sektor usaha menyebabkan banyak sumber PAD seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan, tidak dapat dihimpun secara optimal. Penurunan PAD ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan fisik, termasuk proyek-proyek belanja modal yang memiliki efek jangka panjang (Nurma & Asyik, 2023).

5. Dana Alokasi Umum

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan anggaran mereka didanai secara memadai di bawah sistem desentralisasi. Namun, ketidakseimbangan fiskal tetap terjadi karena pada kenyataannya setiap daerah menerima jumlah dana yang berbeda-beda (Pratiwi, 2019). Dukungan pemerintah dalam bentuk dana alokasi umum diberikan kepada daerah sebagai respons terhadap situasi ini.

Dana yang disalurkan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna mendorong distribusi anggaran yang adil dan

mendukung pengeluaran terkait desentralisasi disebut sebagai Dana Alokasi Umum dalam PP. No. 55 Tahun 2005.

Untuk mencapai pemerataan fiskal di berbagai daerah, Dana Alokasi Umum disusun sebagai "hibah blok", yang berarti bahwa setiap pemerintah membelanjakan dana tersebut sesuai keinginannya. Gagasan di balik desentralisasi fiskal adalah bahwa alih-alih bergantung sepenuhnya pada dana alokasi umum (DAU), untuk memenuhi harapan pemerintah pusat (Nurzen & Riharjo, 2016). Tujuan pemerintah adalah meningkatkan kualitas layanan publik, melalui pengalihan dana alokasi umum (DAU) serta pendapatan asli daerah (PAD) diarahkan untuk membiayai pengeluaran publik.

Di tengah penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19, dana alokasi umum (DAU) menjadi instrumen krusial untuk memperkuat anggaran daerah (Indriani *et al.*, 2021). Tetapi pemerintah pusat juga memfokuskan kembali dan mengalokasikan kembali dana, sehingga beberapa program DAU harus dihilangkan atau dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19 (Anggraini, 2021). Akibatnya, jumlah investasi modal yang dapat dicapai dibatasi karena menyusutnya ruang fiskal regional.

6. Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan dana alokasi khusus (DAK) daerah untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Sumber pendanaan ini berasal dari APBN. Dengan memprioritaskan sektor-

sektor seperti pertanian dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dalam penyediaan layanan publik (Fitriyanti & Handayani, 2021). DAK juga berkontribusi terhadap pertumbuhan aset tetap pemerintah, yang berdampak pada layanan publik yang lebih baik, penyalurannya diyakini memiliki dampak pada anggaran belanja modal.

(Riviando *et al.*, 2019), mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan prioritas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus berdasar pada tiga kriteria yaitu :

1. Persyaratan umum yang berkaitan pada tingkat kemampuan daerah, yaitu dihitung untuk mengevaluasi APBD dalam membangun daerah, dilihat dari selisih antara penerimaan umum total belanja pegawai.
2. Persyaratan khusus mengacu pada undang-undang dan di dalamnya mengatur tentang kekhususan suatu daerah. Yang termasuk dalam karakteristik ini ialah daerah pesisir, kepulauan, wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah rawan bencana, dan wilayah ketahanan pangan.
3. Kriteria teknis, mencakup tolok ukur standar mutu dan jumlah pembangunan, disertai prediksi manfaat regional dan nasional yang menjadi pertimbangan dalam analisis teknis.

Pada masa pandemi, alokasi dan penyaluran DAK mengalami penyesuaian, termasuk perubahan skema penyaluran dan prioritas penggunaan (Sanjaya, 2020). Sebagian DAK difokuskan ulang untuk mendukung sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penguatan sistem

ketahanan sosial. Meskipun tetap difungsikan untuk Belanja Modal, namun fleksibilitas penggunaannya menjadi terbatas, dan di beberapa kasus penyalurannya mengalami keterlambatan, sehingga memengaruhi pelaksanaan program pembangunan.

B. Hasil Penelitian Terhadulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan objek atau topik yang sama atau relevan dengan topik yang akan diteliti. Melalui penelitian terdahulu ini, variabel yang akan diteliti dapat dibandingkan atau dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Studi ini mengkaji tujuh belas penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama: bagaimana pandemi memengaruhi fungsi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Identitas Jurnal	Variabel	Hasil
1.	Ayem dan Pratama, Vol. 2 No. 2 Oktober 2018	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan terhadap besarnya belanja modal. b. Dana alokasi umum tidak berdampak terhadap pendanaan belanja modal. c. Dana alokasi khusus bukan merupakan faktor utama dalam

			<p>perspektif belanja modal.</p> <p>d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap belanja modal.</p>
2.	Permatasari dan Mildawati, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Januari 2016, ISSN : 2460-0585	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. PAD mendorong belanja modal. b. Belanja modal mendorong DAU c. Dana Alokasi Khusus mendorong belanja modal.
3.	Atikasari, dkk, Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017, ISSN : 2301-8879	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Belanja modal tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. b. Belanja modal tetap meningkat karena PAD. c. Belanja modal tidak terpengaruh oleh DAU. d. DAK tidak memengaruhi belanja modal dengan cara apa pun.
4.	Sianturi dan Putri, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi, Vol. 1. No. 3, Februari 2018	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus <p>Variabel dependen : Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. PAD secara signifikan meningkatkan Belanja Modal. b. Dana Alokasi Umum secara signifikan meningkatkan Belanja Modal.

			c. DAU merugikan belanja modal.
5.	Dewi, Elvia. Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora, Vol. 01 No.04, November 2019 E-ISSN : 2628-5661	Variabel independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. b. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. c. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.
6.	Mayasari, dkk. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume: 2, No. 1, 2014	Variabel Independen : 1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pertumbuhan ekonomi mendorong belanja modal secara signifikan b. Pendapatan Asli Daerah mendorong belanja modal secara signifikan. c. Dana Alokasi Umum mendorong belanja modal secara signifikan.
7.	Surakhman, dkk. Vol. 7, No. 2, Desember 2019, P-ISSN : 2088-5644; E-ISSN : 2614-008X	Variabel Independen : 1. Dana Alokasi Umum 2. Dana Alokasi Khusus 3. Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Dana Alokasi Umum (DAU) mendorong Belanja Modal secara signifikan. b. Dana Alokasi Khusus (DAK) mendorong Belanja Modal secara signifikan. c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

			mendorong Belanja Modal secara signifikan.
8.	Al Ahzar dan Hermanto, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 8, Agustus 2017, e-ISSN : 2460-0585	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. b. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. c. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.
9.	Sandi, dkk. Universitas Mahasaraswati Denpasar (2019)	Variabel Independen : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. b. Dampak pendapatan asli daerah terhadap belanja modal bersifat positif dan signifikan. c. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. d. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus cenderung memberikan dampak positif terhadap belanja modal.
10.	Susanti dan Fahlevi , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum	a. Pendapatan Asli Daerah mendorong Belanja Modal.

	Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1, (2016)	Variabel Dependen : Belanja Modal	b. Dana Alokasi Umum mendorong belanja modal.
11.	Febriana, dkk. E-proceeding of Management : Vol.3, No.2, Agustus 2016, ISSN : 2355-9357	Variabel Independen : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. b. Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.
12.	Kakasih, dkk. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 18, No. 02, Tahun 2018	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Total belanja modal tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah. b. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal bersifat positif dan signifikan.
13.	Andrian dan Samekto, Jurnal telaah dan riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2, Juli 2017, ISSN : 1693-3397	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pendapatan Asli Daerah mendorong Belanja Modal. b. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. c. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.
14.	Tolu, dkk. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 2, Tahun 2016	Variabel Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum	a. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan

		<p>3. Dana Alokasi Khusus</p> <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	<p>terhadap Belanja Modal.</p> <p>b. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p>
15.	<p>Fathia dan Rusdi, Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, ISSN : 2720-9687</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel Dependen : Belanja Modal</p>	<p>a. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>b. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap jumlah dana yang dibelanjakan untuk belanja modal.</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengeluaran yang dilakukan untuk belanja modal.</p> <p>d. Belanja Modal dipengaruhi secara positif oleh Pendapatan Asli Daerah.</p>
16.	<p>Nurzen dan Riharjo, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi :</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 	<p>a. Tidak ditemukan hubungan yang berarti secara statistic antara Pertumbuhan</p>

	Volume 5, Nomor 4, April 2016, ISSN : 2460-0585	3. Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	Ekonomi dengan Belanja Modal. b. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terbukti signifikan. c. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
17.	Dewi dan Asyik, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN : 2460-0585	Variabel Independen : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	a. Pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi belanja modal secara signifikan. b. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. c. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal secara signifikan.

C. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel dependen, yang disebut belanja modal (Y) dan variabel independen, yang disebut pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3), dan dana alokasi khusus (X4), dijelaskan oleh kerangka ini. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terbukti positif dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi, maka alokasi

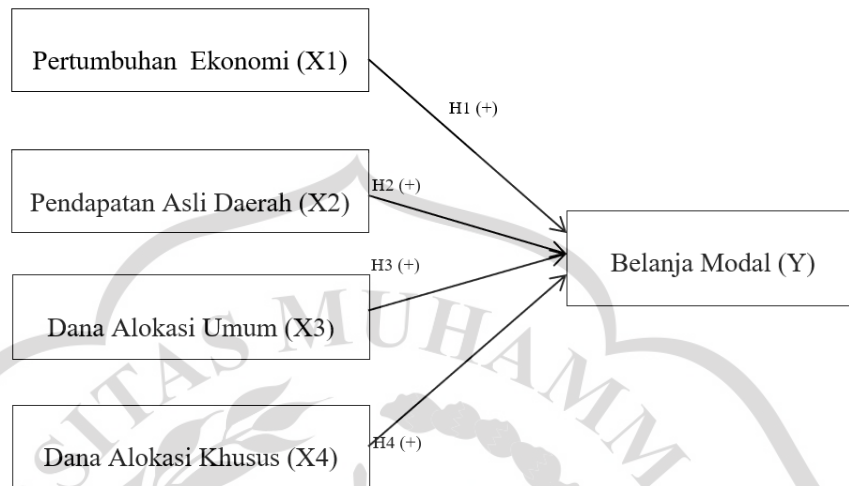
belanja modal juga ikut meningkat (Alfasadun *et al.*, 2017). Dengan infrastruktur yang mendukung, pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Hal ini dapat diwujudkan melalui anggaran belanja modal tahunan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kemudian hasil penelitian dari Al Azhar & Hermanto (2017), berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara PAD dan belanja modal, karena semakin besar PAD, semakin besar pula belanja modal. Hal ini memperjelas adanya korelasi antara keduanya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dihasilkan dari potensi masing-masing daerah. Dana ini dapat diciptakan dan dimanfaatkan secara mandiri untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. (Surakhman *et al.*, 2019). Infrastruktur industri yang dibangun memiliki dampak yang nyata terhadap pertumbuhan PAD.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar & Hermanto (2017), karena fungsi utama dana alokasi umum adalah memastikan pemerintah daerah memiliki akses pendanaan baik untuk operasionalnya, wajar jika DAU dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Ketimpangan sumber daya keuangan antar daerah mendorong pembentukan DAU ini.

Selain itu, belanja modal dipengaruhi secara positif oleh dana alokasi khusus menandakan peningkatan DAK mampu mendorong peningkatan belanja modal (Aditiya & Dirgantari, 2017). Dapat disimpulkan, maka DAK ditekankan kepada belanja modal untuk pemerintah daerah agar bisa

melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas nasional (Noviarti & Rahayu, 2021).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan PDB suatu negara berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas manufaktur dalam menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan produksi dan pendapatan merupakan indikator utama untuk pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto. Proses manufaktur membutuhkan input seperti modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output. Sebagai bentuk intervensi fiskal, pemerintah secara rutin mengalokasikan dana untuk belanja modal setiap tahun guna memacu pembangunan ekonomi. Hal ini tentu akan memengaruhi penyaluran belanja modal oleh pemerintah daerah (Regina, 2022).

Husen & Runtuwuwu (2021), menyatakan bahwa laju pembangunan ekonomi bervariasi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan potensinya, oleh karena itu, investasi modal baik dari sumber swasta maupun public cenderung lebih besar di wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Investasi dalam aset tetap berkorelasi positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Temuan penelitian oleh Nugraha & Dwirandra (2016), menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan belanja modal. Hipotesis berikut diajukan oleh penulis berdasarkan penjelasan teoretis di atas:

H₁ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada masa pandemi.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu cara daerah mendapatkan dana melalui PAD, atau pendapatan asli daerah (PAD). Agar PAD dapat ditingkatkan, pemerintah daerah wajib memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal. Hal ini akan membantu pembiayaan inisiatif layanan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ruang publik dan infrastruktur (Sianturi & Putri, 2018).

Masyarakat telah menyumbangkan sebagian keuangannya melalui pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya, yang berarti bahwa pemerintah yang berperan sebagai pengelola, mempunyai kewajiban terhadap

masyarakat, yang merupakan prinsip dalam teori manajemen (Adyatma & Oktaviani, 2015). Karena belanja modal bagian dari pendapatan asli daerah, dapat dikatakan bahwa keduanya berjalan beriringan. Pendapatan asli daerah yang lebih besar merupakan hasil kombinasi berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang lebih baik, produktivitas penduduk yang lebih tinggi, dan masuknya modal investasi (Aysem & Pratama, 2018).

Menurut penelitian Dewi (2019), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif, artinya kemampuan daerah dalam menyalurkan belanja modal berbanding lurus dengan pendapatan asli daerahnya.

Sianturi & Putri (2018), menunjukkan hubungan positif antara jumlah dana yang dikeluarkan untuk belanja modal dan jumlah dana yang diperoleh pemerintah daerah. Penulis mengajukan sebuah teori, yaitu berdasarkan penjelasan teoretis yang diberikan di atas:

H₂ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada masa pandemi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Sianturi & Putri (2018), salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana alokasi umum (DAU), bertujuan untuk menyediakan bantuan keuangan bagi pengeluaran yang berkaitan dengan desentralisasi. DAU didistribusikan secara merata ke seluruh daerah.

Baik dana alokasi umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi pada kemampuan sektor publik untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik jangka panjang. Perbedaan antara keduanya adalah dana alokasi umum (DAU) menerima pendanaannya dari pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN, sementara pendapatan asli daerah (PAD) berasal langsung dari masyarakat (Al Azhar & Hermanto, 2017).

Permatasari & Mildawati (2016), serta Surakhman *et al.*, (2019), menyatakan penelitian ini bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, dengan DAU yang lebih besar menunjukkan kapasitas daerah yang lebih kuat untuk menerima belanja modal. Penulis mengajukan sebuah teori, yaitu berdasarkan penjelasan teoritis yang diberikan di atas:

H₃ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada masa pandemi.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) adalah dua jenis dana alokasi yang diterima oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dana bagi program-program tertentu, dan DAK diharapkan dapat meringankan beban ini.

Undang-undang yang mengatur penggunaan dana alokasi khusus (DAK) menekankan investasi pada aset fisik. Tujuan peraturan ini adalah untuk

meningkatkan sarana dan prasarana guna mendorong pembangunan ekonomi. Selain itu, peraturan ini akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang akan mendorong mereka untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur melalui dana alokasi khusus. (Sianturi & Putri, 2018).

Menurut Siregar & Zebua (2021), DAK yang bersumber dari APBN memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan daerah tertentu, sehingga memengaruhi realisasi belanja modal.

Berdasarkan temuan dari Surakhman *et al.*, (2019), bahwa belanja modal dipengaruhi secara positif oleh dana alokasi khusus. Selain itu, Andrian & Samekto (2017), juga menyatakan bahwa belanja modal berkorelasi positif dengan pendapatan DAK, menunjukkan peningkatan pendapatan DAK akan mendorong peningkatan belanja modal pada bidang terkait. Penulis mengemukakan teori berikut sebagai hasil dari teori sebelumnya: :

H₄ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Dana Alokasi Khusus dan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada masa pandemi.